

OTONOMI DESA DALAM PENGELOLAAN ASSET DESA (Studi Kasus Pada Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

Kartika Permatasari, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail:kartikapermata91@gmail.com

Abstract: Village Autonomy in Management Village Asset. Village asset management is a form of village autonomy. This study to determine the asset management of the village in the village Sitirejo, autonomy anything that looks, inhibiting and support factors of the asset management. The results are 1) asset management planning is done by the village planning will be utilized and perform asset investarisasi village and organize anyone involved in asset management. 2) Implementation of asset management by managing the village performed by knowing the usefulness of assets. Assets used to fill the needs of shopping village. 3) Monitoring the management by village head and the village asset management involves BPD. Inhibiting factor is a village asset management asset villages are mostly used to finance the village so difficult to develop, and asset utilization village less than maximum. Support factor is the amount of cash land extensive village to be developed, and the potential of nature village Sitirejo.

Keywords: village autonomy, village assets, village assets management

Abstrak: Otonomi Desa dalam Pengelolaan Asset Desa. Pengelolaan asset desa adalah salah satu bentuk dari adanya otonomi desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan asset desa di Desa Sitirejo, otonomi apa saja yang terlihat, serta faktor penghambat dan pendorong adanya pengelolaan asset desa. Hasil penelitian adalah 1) Perencanaan pengelolaan asset desa dilakukan dengan perencanaan yang akan dimanfaatkan dan melakukan investarisasi asset desa serta mengatur pihak mana saja yang terlibat dalam pengelolaan asset. 2) Pelaksanaan pengelolaan dilakukan dengan mengelola asset desa dengan mengetahui kegunaan asset tersebut. Asset yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan desa dalam belanja desa. 3) Pengawasan pengelolaan melibatkan Kepala Desa dalam pengelolaan asset desa dan melibatkan BPD dalam pengawasan kegiatan. Faktor penghambat pengelolaan asset desa adalah asset desa yang ada sebagian besar digunakan untuk membiayai perangkat desa sehingga sulit dikembangkan, dan pemanfaatan asset desa yang kurang maksimal. Sedangkan faktor pendorong adalah jumlah tanah kas desa yang luas untuk dikembangkan, dan potensi alam di Desa Sitirejo.

Kata kunci: otonomi desa, asset desa, pengelolaan asset desa

Pendahuluan

Berawal dari munculnya sistem pemerintahan yang baru, desentralisasi membagi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah itu sendiri merupakan bagian dari desentralisasi tersebut. Tumbuhnya desentralisasi disebabkan karena adanya pembangunan yang sepenuhnya tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah pusat, sehingga membuat pemerintah pusat memberikan wewenang atau otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengendalikan dan merencanakan pem-

angunan daerah. Desentralisasi tidak hanya mencakup pembangunan daerah saja, tetapi juga penyelenggaraan pemerintahan dan segala urusan yang berkenaan dengan daerah tersebut.

Dengan adanya desentralisasi itu, otonomi daerah juga tumbuh karena adanya beberapa tuntutan dari berbagai pihak mampu untuk mengubah sistem pemerintahan yang ada sebelumnya. Kewenangan daerah tersebut menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Bab III pasal 10 ayat 2 yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian hal tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya Undang-undang No 72 Tahun 2005 tentang Desa. Munculnya undang ini memperkuat akan otonomi desa yang sebelumnya telah dimiliki oleh desa. Otonomi desa yang berarti juga kekuatan hukum yang dimiliki suatu desa untuk dapat melakukan beberapa tindakan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam tindakan hukum yang dimiliki oleh desa, salah satunya adalah memiliki harta benda dan kekayaan sendiri. Kekayaan desa atau yang biasa disebut asset desa merupakan harta yang dimiliki oleh desa dan hal itu yang membedakan antara desa dengan kelurahan. Beberapa macam asset desa yang telah disebutkan merupakan hak milik atas desa yang dapat dikelola oleh desa itu sendiri. Pemerintah daerah hanya memberi bantuan dana sesuai kebutuhan desa yang sering disebut dengan dana alokasi desa yang kemudian nantinya akan membantu proses pembangunan desa.

Suatu asset desa akan sangat berguna jika dikelola sangat baik pula oleh pemerintah desa. Pengelolaan asset desa yang baik dilakukan ini berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan memiliki pedoman dalam pengelolaannya. Menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 2007, pengertian dari pengelolaan itu sendiri adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengelolaan asset desa dilakukan berdasarkan peraturan yang sesuai, yang dimana kegiatan tersebut dapat berupa suatu pemanfaatan tanah kas desa, dan kegiatan lain yang disebutkan pada

Permendagri Nomor 4 Tahun 2007. Dalam pengelolaannya sangat penting bagi desa untuk mengacu pada pedoman pengelolaan asset desa dalam mengelola asset desa.

Pengelolaan asset desa adalah salah satu cara bagi desa untuk dapat melakukan suatu pembangunan. Pengelolaan yang baik tentu menggunakan pedoman dalam pengelolaannya. Tanah kas desa yang merupakan asset desa yang perlu dikelola dengan baik dengan cara membagi tanah kas desa sesuai dengan kebutuhan desa. Tidak jarang ditemukan permasalahan dalam pengelolaan asset desa tersebut. Pembagian tanah kas desa yang dilakukan oleh pemerintah desa perlu ditinjau dari seberapa banyak kebutuhan desa untuk melakukan pembangunan. Pengelolaan asset desa dilakukan ketika pemerintah desa telah membaginya dalam beberapa bidang, seperti pembagiannya untuk kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan mungkin juga untuk perekonomian, namun hal tersebut belum tampak pada Desa. Dengan kebutuhan yang dimiliki oleh suatu desa, pemerintah desa perlu mengetahui bagaimana cara untuk mengelola asset desa yang baik dengan menggunakan pedoman yang ada, sama halnya dengan masyarakat desa yang ingin mengetahui bagaimana pengelolaan asset desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga peneliti akan mengangkat permasalahan mengenai Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Asset Desa.

Tinjauan Pustaka

1. Otonomi Desa

Otonomi desa menurut pengertian Sabtoni (2005, h.16) merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta

merupakan pemaknaan standar yang formalis dan tidak *clear* dalam kehidupan masyarakat desa. Sedangkan menurut Rozaki (2004, h.16) otonomi desa merupakan kemandirian desa yang ditopang dengan swadaya dan gotong royong masyarakat setempat untuk membiayai pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasayarakatan desa.

2. Teori Agensi dan Manajemen Keuangan

Dalam pengelolaan suatu kekayaan, dapat ditinjau pula dari teori keagenan atau yang biasa disebut dengan teori agensi. Teori agensi ini merupakan cabang dari ekonomi yang mempelajari tentang perilaku pemberi amanat (pemilik) dan agennya (manajer). Jensen dan Meckling dalam tulisan Van Horne (1997, h.5) menunjukkan bahwa, pemegang saham dapat meyakinkan diri mereka, bahwa agen (pihak manajemen) akan membuat keputusan yang optimal hanya jika disertai pengawasan dan pemberian intensif yang memadai. Semakin sedikit persentase kepemilikan manajer, semakin mereka tidak akan terlalu mengutamakan kepentingan pemegang saham dan semakin pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya, besar juga kebutuhan akan pengawasan

Pandangan mengenai manajemen keuangan dalam bukunya Van Horne (1997, h.2) adalah segala aktivitas berhubungan dengan perolehan, pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Oleh karena itu fungsi pembuatan keputusan dari manajemen keuangan dapat dibagi menjadi tiga area utama keputusan sehubungan investasi, pendanaan, dan manajemen aktiva.

3. Pengelolaan Asset Desa

Dalam suatu pengelolaan terdapat suatu proses, proses melakukan kegiatan ini dimulai dari adanya proses perencanaan, pelaksanaan rencana tersebut, sampai pada pengawasannya.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Perencanaan juga adalah penentu tujuan yang akan dicapai, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa.

b. Pelaksanaan

Untuk pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum
- 2) Akuntabilitas proses
- 3) Akuntabilitas kebijakan

c. Pengawasan

Suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan sesuai dengan rencana dan perintah kebijakan yang telah ditentukan

Metode Penelitian

Penelitian jurnal ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti disini memfokuskan penelitian menjadi tiga pokok bahasan; Pokok bahasan pertama, Pengelolaan asset desa dalam meningkatkan otonomi desa, meliputi: otonomi desa apa saja yang ada di Desa Sitirejo; Kedua, pengelolaan asset desa yang ada di Desa Sitirejo; Ketiga, faktor yang menghambat dan faktor pendorong, Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Model analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah model analisis data Burhan Bungin yang terdiri dari lima tahap yaitu, meneliti dari beberapa unit, memeriksa data yang

diperoleh, mereduksi data, penerapan data yaitu pengolahan data, dan menganalisa serta menarik kesimpulan.

Pembahasan

Otonomi Desa

Otonomi desa telah ada sejak dahulu dan perlu adanya peningkatan. Otonomi tidak hanya berupa wewenang atas wilayah, tetapi juga yang ada di dalamnya. Kewenangan untuk mengelola asset desa adalah salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Menurut Sabtoni, kewenangan tersebut meliputi mengatur dan mengurus rumah tangganya, termasuk untuk mengurus tanah desa yang dimiliki.

Pengelolaan kekayaan desa dilakukan oleh kepala desa beserta perangkat desa dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa. Dalam hal pengelolaan kekayaan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat, menjadi hak pemerintah desa untuk mengelola kekayaannya tanpa ada campur tangan dari pemerintah kabupaten atau pemerintah pusat. Kebutuhan desa menjadi hal yang utama bagi pemerintah desa untuk dapat mengelola kekayaan demi kepentingan masyarakat, dan hal tersebut yang menjadikan desa memiliki otonomi dalam pengelolaan kekayaan.

Pemerintah desa juga memiliki otonomi untuk melakukan kerja sama dengan siapapun dan pihak manapun. Dalam Permendagri juga dijelaskan mengenai kerjasama yang dilakukan dalam pemanfaatan kekayaan. Jika dikaitkan dengan pengelolaan yang dilakukan oleh perangkat desa, perangkat desa hanya dapat menyewakan tanah kas yang dimiliki, dan penyewaan tersebut dilakukan dengan surat perjanjian yang memuat segala hal tentang penyewaan, dan hal tersebut telah diatur dalam Permendagri no 4 tahun 2007. Sehingga pemerintah desa dapat mengacu pada

peraturan tersebut untuk dapat mengelola asset desa secara maksimal.

Dalam otonomi desa juga terdapat suatu perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa sendiri. Perencanaan yang dilakukan berupa pembangunan, tidak hanya menggunakan uang kas desa, tetapi juga menggunakan tanah kas desa. Perencanaan tersebut salah satunya dengan akan membangun irigasi untuk kebutuhan petani. Banyak perencanaan yang dilakukan, namun juga menemui kegagalan.

Perencanaan pembangunan yang dilakukan melibatkan berbagai elemen masyarakat, dan juga pemerintah desa. Kepala desa memegang kuasa penuh dalam pemerintahan desa dan juga berwenang terhadap keuangan desa. Sehingga untuk melakukan suatu perencanaan, kepala desa dapat menggunakan kas desa untuk melakukan pembangunan.

Selain pembangunan, otonomi desa juga termasuk di dalamnya adalah BPD yang merupakan badan otonomi desa. BPD merupakan salah satu bagian dari pemerintahan desa, dan mempunyai peran penting. Dalam fungsinya BPD juga sebagai pengawas dalam kegiatan pemerintah, sehingga perlu adanya hubungan yang baik antara BPD dengan perangkat desa. Berdasarkan UU no 72 tahun 2005, BPD memiliki kedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengelolaan Asset Desa

Otonomi desa telah ada sejak lama telah mempengaruhi kinerja pemerintahan desa di masa sekarang termasuk dalam mengelola asset desa. Secara yuridis desa juga merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat atau dapat dikatakan kewenangan tersebut lebih kepada kewenangan dari pemerintah

desa. Pengelolaan memiliki tiga kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Langkah awal dalam pengelolaan adalah perencanaan. Perencanaan dapat dilakukan dengan membuat daftar pemanfaatan tanah desa, setelah itu melakukan inventarisasi macam-macam asset desa. Untuk asset yang berupa tanah kas desa, sepenuhnya dikelola oleh perangkat desa, dan asset yang lainnya dikelola untuk masyarakat desa, seperti pasar desa dan bangunan desa. Asset Desa Sitirejo berupa tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa seperti balai desa, balai RW, posyandu, dan bangunan Sekolah Dasar, serta lapangan olah raga.

Setelah melakukan perencanaan, pengelolaan memasuki tahap pelaksanaan, pelaksanaan tersebut sesuai dengan jenis asset. Jika assetnya berupa tanah kas desa, pelaksanaannya diserahkan pada masing-masing perangkat desa, dan jika assetnya berupa pasar, pengelolaannya diserahkan kepada utusan kepala desa, dan untuk pengelolaannya direkapitulasi selama satu bulan dengan membagi pengeluaran dan pemasukan untuk satu bulan tersebut.

Bagian akhir dari pengelolaan adalah pengawasan. Dalam pengelolaannya, pihak yang mengelola asset desa adalah pemerintah desa, yaitu kepala desa beserta perangkat desa. Namun untuk pengawasan pengelolaan asset ini dilakukan oleh kepala desa. Untuk BPD pada desa sendiri tidak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan, tetapi hanya sebagai pemberitahuan dan pengawasan dilakukan oleh kepala desa secara langsung untuk pasar desa. Berbeda dengan tanah kas desa, pengawasannya hanya sekedar untuk pelaporan penggunaan tanah kas saja.

Pemanfaatan asset desa juga memiliki beberapa akuntabilitas, yang diantaranya akuntabilitas kejujuran yang sangat dibutuhkan dalam organisasi, terlebih lagi dalam pengelolaannya tidak terdapat badan pengawas atau jasa penilai untuk

mengawasi jalannya pengelolaan tanah kas desa. Sehingga kejujuran perangkat desa diperlukan untuk menjaga tanah kas desa agar tetap pada fungsinya.

Disamping itu, akuntabilitas proses juga mempengaruhi proses pengelolaan tanah kas. Pengelolaan yang baik tentu juga dengan proses yang baik, bagaimana perangkat desa dapat mempertanggung jawabkan proses dari pengelolaan tanah kas desa tersebut, sehingga proses pengelolaannya dapat berjalan baik sesuai dengan pedoman yang dimiliki.

Selain kedua akuntabilitas tersebut, terdapat juga akuntabilitas kebijakan. Seorang kepala desa yang memiliki kuasa tertinggi dalam suatu desa, berhak untuk membuat kebijakan mengenai pengelolaan tanah kas desa. Seperti yang ada pada Desa Sitirejo, kepala desa membuat kebijakan untuk tanah kas desa mengenai pengelolaannya.

Pada pengelolaan pasar ini juga termasuk dalam kegiatan manajemen keuangan. Secara teoritis, menurut Van Horne dan Wachowicz, manajemen keuangan yang berarti segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Pada Desa Sitirejo, asset desa tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran desa. Namun, terdapat asset desa yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai. Tanah kas desa digunakan untuk membiayai perangkat desa. Untuk belanja desa seperti keperluan pemerintahan desa dan keperluan masyarakat desa, menggunakan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 129.450.000 yang diberikan setiap tahunnya. Untuk pembiayaan perangkat hanya menggunakan tanah kas desa sebagai penghasilannya, dan untuk belanja desa langsung dan tidak langsung menggunakan ada yang diberikan pada ADD.

Faktor Penghambat dan Pendorong dalam Pengelolaan Asset Desa

Asset desa merupakan salah satu hal penting yang dimiliki oleh desa. Asset desa juga membantu desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu asset desa juga membantu desa dalam hal keuangan desa. Seperti yang ada pada UU no 72 tahun 2005 pasal 68 dan 69, menyebutkan bahwa kekayaan desa salah satunya adalah pasar desa dan tanah kas desa. Berbeda dengan asset yang lainnya, pada Desa Sitirejo, kedudukan pasar desa tidak sebagai asset yang menopang keuangan desa. Sehingga sulit untuk mengembangkan asset desa yang dimiliki karena sebagian besar untuk belanja perangkat desa. selain itu, yang menjadi penghambat adalah pemanfaatan asset desa yang kurang maksimal. Perlu adanya pengembangan asset yang lebih dalam pengelolaannya, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih. Beberapa asset desa yang ada termasuk pasar desa, memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat kembali normal dan memberikan pemasukan bagi desa dan pengelolanya.

Untuk faktor yang menghambat, Sulit mengembangkan pengelolaan asset desa karena sebagian besar asset desa untuk belanja perangkat. Asset desa terluas bagi Desa Sitirejo adalah tanah kas desa, dan tanah tersebut digunakan untuk membiayai upah perangkat desa selama menjabat, sehingga dalam penggunaannya menjadi hak penuh bagi perangkat desa, oleh karena itu desa kesulitan untuk mengembangkan pengelolaan asset desa ini.

Selain itu pemanfaatan asset desa yang kurang maksimal. Tanah yang ada pada Desa Sitirejo terbilang cukup luas, namun pengembangannya masih belum maksimal. Perlu adanya beberapa cara untuk meningkatkan pengembangan asset desa, baik berupa pasar desa atau asset lainnya.

Untuk faktor yang mendorong, jumlah tanah kas desa yang cukup luas untuk dikembangkan. Tanah kas desa adalah asset desa yang terluas yang dimiliki, sehingga dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong pengembangan asset desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan pengelola asset dan masyarakat desa. Pengembangan tersebut dapat berupa penggalan potensi alam maupun potensi ekonomi.

Selain jumlah tanah kas, terdapat juga kondisi alam yang baik untuk mengembangkan berbagai potensi desa. Mengembangkan potensi alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi alam desa. Pengembangan potensi alam meliputi peningkatan kualitas pertanian dan perkebunan, seperti memberi fasilitas bibit unggul, bantuan pupuk, dan bantuan pembangunan pengairan yang saat ini telah dibangun.

Kesimpulan

Pengelolaan asset desa mengelola berbagai macam asset desa, namun asset dalam bentuk tanah kas desa dikelola oleh perangkat desa sendiri. Pengelolaan tanah tersebut lebih banyak digunakan untuk kepentingan perangkat desa atau agen sebagai ganti dari pendapatan perangkat desa dan sedikit untuk kepentingan masyarakat desa. Selain itu pemasukan dari pasar desa tidak dapat membantu penambahan kas desa. Sehingga sulit untuk dapat meningkatkan pendapatan kas desa dan membiayai keperluan belanja desa. Oleh karena itu Desa memiliki otonomi untuk mengelola asset desa baik untuk dapat meningkatkan pendapatan desa, maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa dapat memulai dengan memperbaiki kondisi pasar desa menjadi lebih baik dan meningkatkan biaya sewa, serta menekan biaya yang tidak diperlukan dan untuk pengelolaan tanah kas desa yang sebelumnya dikhususkan untuk perangkat

desa, namun untuk dapat meningkatkan pendapatan desa, perangkat desa dapat membangun suatu bangunan yang dapat meningkatkan

nilai ekonomi seperti pembangunan toko, pabrik kecil atau *home industry*, pembangunan gedung serbaguna yang dapat disewakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kertohadikoesoemo, Soetardjo (1984) **Desa**. Jakarta, PN Balai Pustaka.
- Mardiasmo (2002) **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta, ANDI.
- Nurcholis, Hanif (2011) **Pertumbuhan dan Perkembangan Pemerintahan Desa**. Jakarta, Erlangga
- Presiden Republik Indonesia **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 tahun 2005 Tentang Desa**. Jakarta.
- Putra, Zulfikar. **Pengertian Pegelolaan** [internet] Available from: dari <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2108155-pengertian-pengelolaan/> [Accessed 02 April 2013]
- Sabtoni, Anang dkk. (2005) **Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa**. Yogyakarta, IRE Press.
- Van Horne, James C. dan John M. Wachowicz, JR. (1997) **Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan**. Diterjemahkan oleh Heru Sutojo. Jakarta, Salemba Empat.